

SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI INDONESIA

Yohanes G. Bulu
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB
yahanegeli@gmail.com

Abstrak

Penyuluh Pertanian terutama Penyuluh Pertanian Lapangan merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan pertanian di daerah. Organisasi dan kelembagaan penyuluhan yang selalu berubah-ubah menyebabkan tugas pokok dan fungsi penyuluhan tidak lagi berjalan dengan baik. Penyuluhan sebagai suatu sistem penyampaian inovasi dari sumber teknologi kepada pengguna (petani) tidak lagi berfungsi dengan baik. Penggunaan berbagai pendekatan dan metode dalam penyampaian informasi inovasi teknologi yang dibutuhkan pengguna berubah karena banyak tugas non teknis yang dibebankan kepada penyuluh. Petani selaku pengguna inovasi teknologi lebih dominan memperoleh informasi teknologi pertanian dari sumber-sumber lain yang tersedia.

Pendahuluan

Sektor pertanian di Indonesia masih merupakan sektor penting karena potensi sumberdaya alam yang tersedia cukup besar dan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor ini. Berdasarkan kristalisasi dari visi pembangunan pertanian, visi pemerintah pusat dan daerah serta kondisi masyarakat pertanian, maka visi pembangunan pertanian di setiap daerah yaitu "menjadi akselerator pembangunan sektor pertanian untuk mewujudkan pertanian tangguh yang berorientasi pada sistem dan usaha agribisnis melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian secara efisien, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan menuju masyarakat sejahtera".

Penyuluhan pertanian sebagai suatu sistem pemberdayaan petani merupakan suatu sistem pendidikan non formal bagi keluarga petani yang bertujuan membantu petani dalam meningkatkan keterampilan teknis, pengetahuan, mengembangkan perubahan sikap yang lebih positif dan membangun kemandirian dalam mengelola lahan pertaniannya. Penyuluhan pertanian sebagai perantara dalam proses alih teknologi maka tugas utama dari pelayanan penyuluhan adalah memfasilitasi proses belajar, menyediakan informasi teknologi, informasi input dan harga input-output serta informasi pasar (Badan SDM Pertanian, 2003).

Berlakunya otonomi daerah/desentralisasi, maka penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang menyangkut aspek-aspek perencanaan, kelembagaan, ketenagaan, program, manajemen dan pembiayaan menjadi wewenang wajib dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah pusat baik secara langsung maupun melalui pemerintah provinsi mempunyai wewenang untuk memfasilitasi pemerintah

kabupaten/kota sehingga dapat menyelenggarakan penyuluhan pertanian secara produktif, efektif dan efisien sesuai kebutuhan lokalita (Badan Pengembangan SDM Pertanian, 2003).

Disadari bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, hampir semua pemerintah daerah kabupaten/kota kurang memberi prioritas dan dukungan pada aspek penyuluhan pertanian, akibatnya penyelenggaraan penyuluhan tidak terprogram dan terlaksana dengan baik (mengalami stagnasi), sistem penyuluhan kurang terpadu dan tenaga penyuluh lapangan kurang berfungsi dan petani kehilangan partner kerja dalam proses alih teknologi.

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah menimbulkan berbagai permasalahan tentang penyelenggaraan penyuluhan dan kelembagaan penyuluhan di propinsi dan kabupaten/kota. Persepsi pemerintah kabupaten/kota tentang posisi dan peran strategis kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dan di kecamatan menjadi beragam sehingga menimbulkan berbagai permasalahan teknis dan non teknis.

Keberhasilan diseminasi teknologi pertanian hasil penelitian dan pengkajian, sangat tergantung pada aktifitas tenaga penyuluh lapangan dan berfungsinya lembaga penyuluhan disemua tingkatan, karena secara konsepsional penyuluh lapangan merupakan perantara dalam proses alih teknologi dari sumber teknologi kepada petani pengguna.

Jawaban atas fenomena tersebut adalah kemauan politis pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menciptakan kebijakan dalam upaya merekonstruksi dan merevitalisasi serta memberdayakan kembali penyelenggaraan penyuluh pertanian lapangan dan lembaga penyuluhan pertanian.

Beberapa metode dalam sistem penyelenggaraan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota belum berjalan dengan baik dan belum memperlihatkan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dan instansi terkait lainnya seperti institusi penelitian yang merupakan sumber teknologi (litbang pertanian, perguruan tinggi, LSM dan swasta) menyangkut aspek koordinasi, sinkronisasi program dan integrasi pelaksanaan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Sementara perkembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan petani semakin meningkat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Perkembangan kondisi petani saat ini ditandai dengan semakin meningkatnya wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap kritis mereka. Peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan lebih banyak menyangkut aspek pengelolaan usahatani, sedangkan sikap kritis mereka lebih banyak ditujukan pada kebijaksanaan pemerintah antara lain menyangkut subsidi, pengadaan dan distribusi sarana produksi, pasar dan harga serta kebijakan impor komoditi pertanian (Badan Pengembangan SDM Pertanian, 2003).

Basuki (2001) mengkaji tentang hubungan keeratan antara sumber teknologi, peran penyuluh dan kegiatan petani menunjukkan bahwa terjadi hubungan positif antara peran

penyuluh dengan kegiatan petani, dan antara sumber teknologi dan petani, sedangkan hubungan kurang erat terjadi antara sumber teknologi dan peran penyuluh.

Puspadi (2002) menyatakan bahwa sumber teknologi utama petani bukan lagi Penyuluh Pertanian Lapangan dan sumber teknologi utama Penyuluh Pertanian bukan lagi institusi penelitian. Hal ini merupakan indikasi yang kuat bahwa hasil-hasil penelitian institusi-institusi penelitian relatif sangat kecil dimanfaatkan oleh Penyuluh Pertanian sebagai materi penyuluhan, dan sebagian besar Penyuluh Pertanian mengatakan hasil-hasil penelitian hanya dimanfaatkan untuk memperluas wawasan berpikir. Kondisi seperti tersebut di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah media diseminasi teknologi yang diterima relatif sedikit, kesesuaian masalah lapangan dengan waktu penerimaan media diseminasi, mutu teknologi yang disampaikan kepada Penyuluh Pertanian (Puspadi 2002).

Perubahan kondisi petani yang semakin maju menuntut lembaga penyuluhan kabupaten/kota untuk melakukan perubahan-perubahan sistem penyelenggaraan penyuluhan, pengembangan sistem informasi inovasi teknologi, peningkatan profesionalisme penyuluh lapangan untuk dapat merespon semua perubahan yang terjadi secara cepat dan proporsional.

Kelembagaan dan Sistem Penyuluhan Pertanian

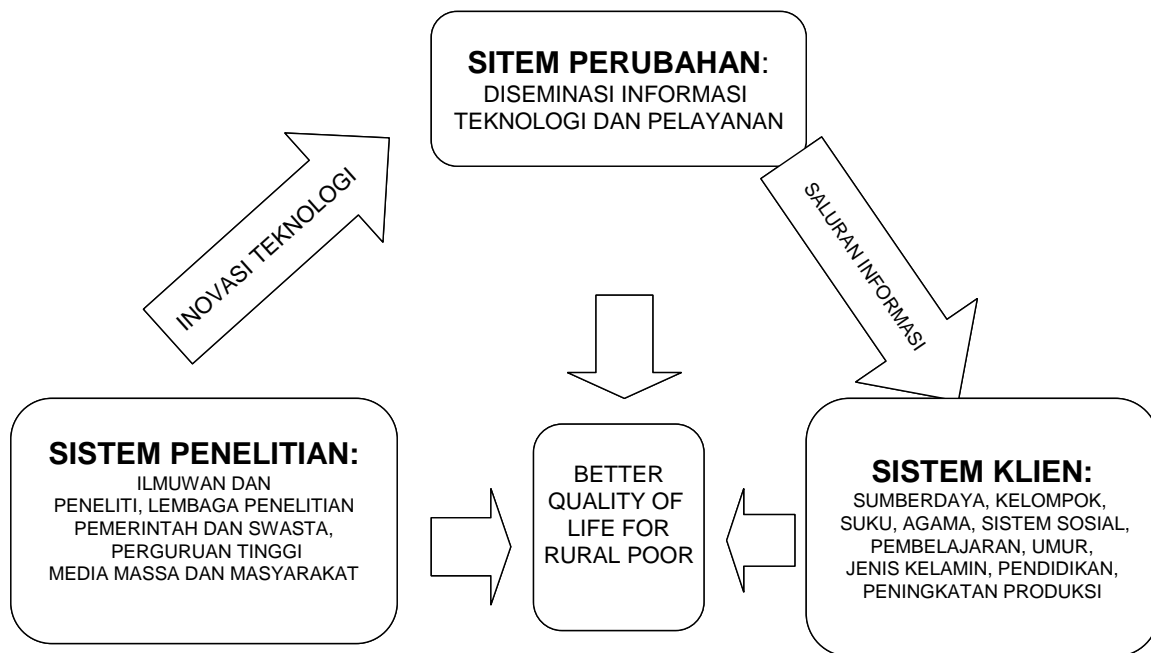
Sejak berkaunya otonomi daerah dengan wewenang penuh pada pemerintah kabupaten/kota melakukan perubahan kelembagaan penyuluhan yang disatukan dengan Dinas Pertanian, mengakibatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian mengalami stagnasi.

Sistem penyuluhan terdiri dari metode-metode, pendekatan-pendekatan dan kelembagaan atau organisasi. Secara makro sistem penyuluhan terdiri dari dua bagian yaitu sistem penyaluran/penyampaian (*delivery system*) dan sistem penerimaan/penerapan (*receiving/adoption system*) (Badan Litbang Pertanian, 2001).

Kelembagaan penyuluhan merupakan faktor penting dalam sistem penyuluhan.; tanpa kelembagaan penyuluhan maka penyelenggaraan penyuluhan tidak bisa berjalan. Posisi dan peran lembaga penyuluhan adalah menyelenggarakan program penyuluhan dengan melakukan penyebarluasan teknologi dari sumber teknologi kepada pengguna (petani) atau klien di dalam sistem sosial. Oleh karena itu lembaga penyuluhan mulai dari pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan tingkat desa harus menjalin hubungan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program, baik secara fungsional maupun secara operasional dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Hubungan antara kelembagaan penyuluhan pertanian pusat, propinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian adalah hubungan fungsional. Hubungan antara kelembagaan penyuluhan pertanian kabupaten/kota dengan kelembagan penyuluhan kecamatan (BPP) adalah hubungan operasional. Demikian halnya hubungan antara komisi penyuluhan pertanian nasional, propinsi dan kabupaten/kota adalah hubungan fungsional.

Menurut Alma S. Tan di dalam Valera, *et al.* (1987), bahwa konsep atau pemikiran mengenai fungsi penyampaian penyuluhan (*Extension Dilevery System*) dapat dilihat dari dinamika, proses dalam kerangka sistem (*system framework*). Lebih lanjut menjelaskan bahwa di dalam system penyuluhan terdapat tiga komponen pokok/utama yaitu: sistem penelitian, sistem perubahan dan sistem klien.



Gambar 1. Komponen utama dalam sistem penyuluhan (Alma S. Tan, 1997)

Sistem penelitian : adalah suatu kegiatan penelitian untuk menghasilkan ilmu dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna.(petani). Teknologi-teknologi yang dihasilkan melalui penelitian tersebut berupa teknologi tepat guna sesuai dengan kondisi masyarakat lokal.(pengetahuan, ekonomi, pendidikan, kebiasaan, tujuan dan nilai-nilai budaya). **Sistem perubahan**: adalah suatu sitem di mana kegiatan-kegiatan lebih diarahkan pada suatu perubahan pada sistem sosial terutama dalam transfer teknologi. Faktor dari sistem ini adalah doktrin, kerja keras, kelembagaan, pengorganisasian program, struktur organisasi, pendekatan atau metode; materi, agen peruba, dan program pemberdayaan.

Pendekatan penyuluhan yang diorganisasikan merupakan perpaduan dan kombinasi strategis yang dari metode-metode di dalam penyuluhan pedesaan di suatu wilayah tertentu. Antara pendekatan yang satu dengan pendekatan lainnya tidak berdiri sendiri (Vicentre A. Martinez dan Ramiro F. Plopino; dalam Valera, *et al*, 1987).

Sistem klien: adalah kelompok, komunitas dan masyarakat desa yang merupakan Klien dari sistem penyampaian penyuluhan. Di dalam konteks penyuluhan, klien merupakan sasaran utama dalam pembangunan pertanian. Klien merupakan penerima informasi inovasi teknologi sesuai kebutuhannya yang diperoleh dengan memanfaatkan saluran komunikasi yang ada.

Esensi dari sistem penyampaian penyuluhan yaitu mekanisme transfer teknologi. Sistem penyebaran dari inovasi teknologi akan sukses jika ada koodinasi dan kerjasama dari semua komponen sistem.

Sistem penyuluhan pertanian di Indonesia didefinisikan sebagai sistem pendidikan non formal untuk petani (termasuk nelayan) dan keluarganya, bertujuan mencapai kemampuan dan pengetahuan lebih baik, mengembangkan sikap positif terhadap perubahan dan menambah kepercayaan diri di dalam usahatani dan kehidupannya. Ide dasarnya adalah untuk membantu petani untuk berdiri sendiri, sehingga mereka dapat memecahkan masalahnya dengan mengadopsi/menerapkan teknologi yang lebih baik di dalam usahatani yang aktivitas utamanya (Martaamidjaya. A. Soedradjat, 1994).

Sistem pendidikan penyuluhan pertanian di Indonesia sangat menaruh perhatian tidak hanya dalam transfer teknologi, tetapi yang utama adalah pendidikan para petani untuk pengembangan berorientasi diri. Dengan demikian tugas pokok penyuluhan pertanian adalah memberikan fasilitas belajar dan aksi proses pada bagian diri petani dengan menyediakan informasi teknologi yang dibutuhkan, keperluan teknik bagaimana mengetahui, akses mengembangkan fasilitas dan dukungan nyata untuk bertani dan berusaha. Dengan demikian penyuluhan pertanian di Indonesia adalah (1). mempunyai arti promosi pengembangan perilaku; (2) merupakan jembatan antara riset/penelitian dan aplikasinya di dalam kelompok masyarakat pertanian; (3) merupakan difusi inovasi pertanian; (4) usaha kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah; (5) mitra antara pemerintah dan masyarakat pertanian, lebih istimewa antara penyuluh pertanian dan para petani.

Menurut Axinn (1985), sistem penyuluhan pertanian terdiri atas dua kategori pokok yaitu sistem penyampaian (*delivery system*) dan sistem perolehan (*acquisition system*). Sistem penyemapaian (*delivery system*) adalah penyampaian informasi teknologi kepada petani berdasarkan kebutuhan dan tujuan organisasi. Sedangkan sistem perolehan (*acquisition system*) di dalam penyuluhan pertanian sangat berbeda. Gagasan yang utama

adalah bahwa kelompok petani, dapat mengorganisir dengan cara apapun, sehingga mereka dapat menjangkau ke luar desanya untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Organisasi ini pada umumnya lebih kecil, seperti asosiasi petani, kelompok kecil petani, atau kelompok-kelompok kerjasama di desa. Agar sistem penyuluhan berhasil, harus dikendalikan oleh kelompok target, dengan mempengaruhi agenda penelitian pertanian dan kebijakan pemerintah pusat.

Sejak tahun 1980-an pemerintah telah memperkenalkan dan mencoba mengembangkan pendekatan penyuluhan partisipatif melalui kegiatan proyek seperti proyek pelatihan PHT, pengembangan sistem usahatani lahan kering Kalimantan (KUF), proyek desentralisasi peternakan Indonesia bagian Timur (DELIVERI), proyek peningkatan pendapatan petani kecil (P4K), proyek pendekatan partisipatif untuk peningkatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan (DAFEP) dan yang mulai tahun 2007 dengan nama proyek FEAT. Namun secara operasional sistem kerja penyuluhan pertanian masih menggunakan sistem kerja latihan dan kunjungan (LAKU) sehingga kurang maksimal dalam proses alih teknologi dan pengembangan sumberdaya manusia. Badan pengembangan sumberdaya manusia pertanian (2003), menilai sistem ini merupakan sistem kerja yang berdasarkan manajemen waktu yang ketat dan mengalihkan teknologi dimana petani hanya dianggap sebagai pengguna teknologi yang dihasilkan lembaga-lembaga penelitian. Dinas-Dinas pertanian di propinsi mempraktekkan kerja LAKU dan menggunakan pendekatan penyuluhan partisipatif tetapi tidak didukung penyediaan dana yang cukup untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Menurut FAO (2001), bahwa sistem latihan dan kunjungan (LAKU) sebenarnya bukanlah sistem penyuluhan pertanian tetapi merupakan sistem kerja penyuluh pertanian. Sistem penyuluhan pertanian yang disepakati bersama belum ada. Menyebabkan tidak jelasnya hubungan antara kelembagaan penyuluhan pertanian pusat – propinsi – kabupaten/kota, sehingga struktur dan mekanisme pembinaan dan tata hubungan kerja juga menjadi tidak jelas (Badan Pengembangan SDM Pertanian, 2003).

Sistem Klien (*Client System*)

Masyarakat desa klien dari sistem penyampaian penyuluhan. Di konteks ini, usaha penyuluhan ditingkatkan oleh suatu penilaian saksama dan akurat menyangkut sumber daya dan kebutuhan, manusia dan material, tentang sistem sosial pedesaan yang dilayani; seperti halnya suatu prinsip pekerjaan pengetahuan tentang orang dewasa dan belajar berkomunikasi efektif. Suatu sistem penyampaian penyuluhan adalah sangat utama dalam suatu mekanisme alih teknologi. Kesuksesan difusi yang sistematis seperti inovasi teknologi memerlukan koordinasi antar semua komponen dalam sistem itu

Klien adalah kelompok sasaran pembangunan atau pembinaan yang berada dalam suatu sistem sosial yang heterogen. Sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu peran sosial yang berinteraksi; atau kelompok sosial yang memiliki nilai, norma dan tujuan yang sama (Garna, 1996). Menurut Campbell dan Barker (1997) dalam FAO (1997), para klien adalah suatu kelompok orang yang heterogen yang dapat dibedakan dari penguasaan sumberdaya (lahan, ternak, sumber-sumber ekonomi), status sosial, bahasa, jenis kelamin, umur, agama dan kesukuan. Roger dan Shoemaker dalam Hanafi (1987), menguraikan bahwa klien merupakan kelompok orang atau masyarakat yang berbeda dalam bahasa, status sosial ekonomi, kemampuan teknis, nilai-nilai, norma-norma dan sikap-sikapnya.

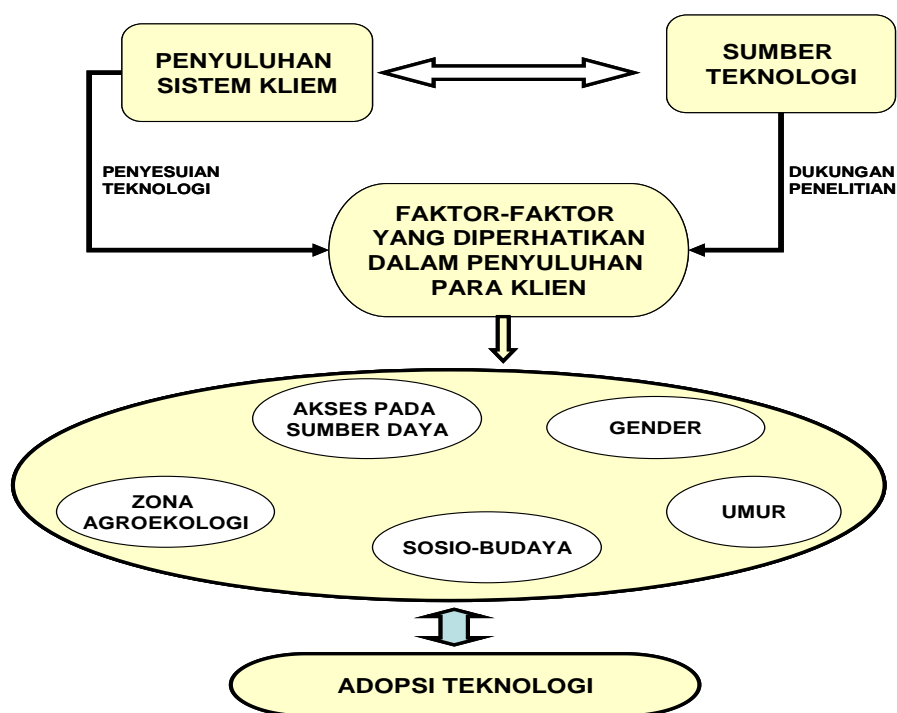
Pelayanan dalam sistem penyuluhan pertanian harus dapat menggunakan semua pilihan metode atau pendekatan untuk mencapai sejumlah besar klien; melayani kebutuhan mereka dalam kaitannya dengan bantuan dan informasi inovasi teknologi yang berkualitas ternasuk informasi ketersediaan input, pasar, harga input dan output. Untuk menyediakan informasi yang spesifik yang dibutuhkan klien terutama yang berkaitan dengan teknologi dan target yang ingin dicapai dapat dipekerjakan kelompok-kelompok spesialis. Pada prinsipnya para klien mencakup semua orang yang terlibat dalam usahatani. Permasalahan yang dihadapi bahwa untuk memberikan pelayanan komersial dan organisasi pendukung di tingkat desa akan mengalami kekurangan tenaga penyuluh yang bisa diharapkan untuk menyediakan informasi dan pelayanan jasa konsultasi secara produktif. Untuk mengatasi hal tersebut maka pelayanan dengan sistem klien diperlukan pendidikan dan latihan kepada petani-petani berhasil agar kemudian dapat membantu melakukan pelayanan jasa penyuluhan pertanian kepada kliennya. Nagel (1997) dalam FAO (1997), mengatakan kementerian basis penyuluhan tidak dapat mencapai mayoritas dari potensial klien untuk ekonomi, *sosio-psikologi* dan alasan-alasan teknis. Secara kuantitatif peningkatan staf penyuluh lapangan menunjukkan bahwa penyuluh yang semakin dekat dengan petani belum memproduksi *client-to-agent* sebagai perbandingan untuk pengendalian. Selain itu keterbatasan biaya, sarana dan prasarana penyuluhan serta infrastruktur pedesaan yang kurang memadai merupakan beberapa kendala yang dihadapi penyuluh dalam pelaksanaan program penyuluhan pertanian.

Pengembangan pertanian masa kini terutama yang berkaitan dengan penyuluhan kepada para klien tidak lagi membedakan berdasarkan kategori kelompok petani tertentu yang menjadi sasaran, akan tetapi harus menjangkau semua lapisan petani; mulai dari petani kecil, buruh tani/petani yang tidak memiliki lahan, wanita tani dan kaum muda tani (Campbell dan Baker dalam FAO, 1997). Menurut Swanson, Roling dan Jiggins (1984) di dalam FAO (1997), menjelaskan bahwa ada empat faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mencari atau pemberian suatu kerangka penyuluhan untuk pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan kelompok target dan para klien. Faktor-faktor tersebut

adalah zona-agroekologi, akses terhadap sumber daya, jenis kelamin (jender), umur petani dan kelompok kesukuan.

Zona-agroekologi merupakan faktor penting yang perlu diidentifikasi seperti bio-fisik, jenis lahan, kesuburan tanah, pola curah hujan, kemiringan dan ketinggian tempat akan mempengaruhi pengembangan teknologi spesifik lokasi (*location-specific*). Faktor-faktor bio-fisik tersebut dapat mempengaruhi adopsi teknologi. Oleh karena itu dalam penyuluhan sistem klien indikator-indikator tersebut yang perlu diperhatikan dalam penyampain informasi inovasi teknologi.

Faktor akses terhadap sumberdaya adalah menjelaskan faktor-faktor sosial ekonomi yang membedakan akses petani yang satu dengan petani lainnya terhadap faktor-faktor produksi seperti status penguasaan lahan (luas, pemilik, penyakap, penyewa, gadai), modal (sumber modal, pinjaman, kredit, cara memperoleh krdit, cara penumbuhan modal), tenaga kerja (tenaga kerja keluarga, luar keluarga/upahan, ketersediaan biaya, komunal), input (ketersediaan benih, pupuk dan obat-obatan), pasar (tempat, harga, gudang, transportasi, jarak), kemampuan penggunaan teknologi dan informasi (ketersediaan jasa penyuluhan, kesesuaian teknologi) (Swanson, *et al*, 1984, dalam FAO, 1997). Faktor-faktor tersebut mempengaruhi petani untuk mengadopsi jenis inovasi tertentu sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan teknologi yang sesuai untuk penyuluhan kepada para klien.



Gambar 2. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyuluhan sistem klien terutama berkaitan dengan pengembangan teknologi (Cambell dan Barker, 1997)

Peran wanita tani dalam produksi pertanian kini menjadi isu pokok karena selama ini jarang dilibatkan pada kegiatan-kegiatan penyuluhan. Dalam kaitan dengan pengembangan teknologi peran wanita tani dalam akses terhadap sumberdaya dan teknologi lebih efektif sehingga dalam program penyuluhan terhadap klien perlu mempertimbangkan isu jender sebagai bagian dari program penyuluhan (Feldstein dan Poats, 1989, dalam FAO, 1997). Kenyataan menunjukkan bahwa peran wanita tani dalam pengelolaan usahatani jauh lebih besar terutama curahan waktu kerja pada kegiatan tanam, menyiang, pemupukan, panen dan pascapanen.

Faktor umur merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan terhadap keberlangsungan produksi pertanian di pedesaan. Karakteristik umur petani akan mempengaruhi tingkat adopsi teknologi sebab semakin tinggi umur petani maka semakin rendah tingkat adopsi teknologi sehingga pendapatan yang diperoleh semakin rendah. Akhir-akhir ini para kaum muda tani yang merupakan tenaga kerja produktif dan berpendidikan cenderung meninggalkan desanya untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dan lebih mudah untuk memperoleh uang seperti sebagai buruh bangunan, TKI dan lain-lain. Jika demikian maka investasi di sektor pertanian akan semakin menurun, sehingga dalam program penyuluhan perlu mendapat perhatian khusus dengan menggunakan metode-metode yang lebih efektif untuk mempengaruhi dan mendorong kaum muda tani untuk tinggal di desanya.

Program penyuluhan pertanian dengan sistem klien, di mana faktor kesukuan merupakan salah satu faktor sangat penting yang perlu diperhatikan dalam memilih dan menerapkan metode penyuluhan yang sesuai dengan kondisi atau karakteristik sosial budaya (*sociocultural*) para klien. Karakteristik sosial budaya seperti bahasa, agama, nilai, norma, tujuan sosial, sangsi-sangsi, falsafah hidup dan pola tingkalku dari suatu kelompok masyarakat, suku dan komunitas merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program penyuluhan dan transfer inovasi teknologi sistem klien.

Menurut Nagel (1997) dalam FAO (1997), dalam memilih klien untuk penyuluhan terdapat beberapa pendekatan yaitu penyuluhan kepada klien berdasarkan komoditas (*Commodity Based Extension*), penyuluhan sebagai layanan komersial (*Extension as a Commercial Service*), dan kontrol penyuluhan kontrol klien dan berbasis klien (*Client-Based and Client-Controlled Extension*).

Penyuluhan berdasarkan komoditi merupakan pendekatan yang umum dilakukan baik di Indonesia maupun di negara-negara Afrika yang dilakukan pemerintah, perusahaan dan swasta melalui kegiatan proyek. Pendekatan tersebut petani tidak dapat bereaksi secara cepat untuk menghadapi fluktuasi dan standar mutu yang dapat mempengaruhi harga sehingga keuntungan yang diperoleh relatif rendah baik secara kelompok maupun pribadi/perorangan.

Penyuluhan sebagai layanan komersial merupakan pendekatan terbaru dan khas dengan menggunakan kerangka industrialisasi pertanian. Strategi dan pendekatan penyuluhan sebagai layanan komersial adalah dimana penyuluh lapangan menyediakan pelayanan konsultasi khusus yang dituntut oleh suatu produsen pertanian. Sasaran dalam menggunakan pendekatan tersebut adalah kelompok tani atau individu yang lebih memprioritaskan perolehan keuntungan sehingga pada gilirannya dapat memperkuat kepuasan klien.

Penyuluhan kontrol klien dan berbasis klien merupakan suatu pandangan dalam sistem penyuluhan untuk memanfaatkan potensi penyuluh lokal dari kelompok-kelompok di pedesaan untuk membantu dirinya sendiri. Pendekatan desentralisasi ini sering diorganisir oleh orang luar dalam posisi yang lebih baik untuk melayani kebutuhan dari kelompok target spesifik. Prinsip dari pendekatan tersebut dengan mengorganisir (kesadaran, kemampuan diri sendiri, partisipasi/keterlibatan, pelayanan pada diri sendiri) adalah mirip dengan pendekatan filosofi *Animasi Rurale* tanpa dimensi yang nasional. Pandangan dari pendekatan tersebut sesuai pendapat Roger dan Shoemaker dalam Hanafi (1987), bahwa tujuan akhir seorang penyuluh adalah berkembangnya perilaku pembaruan diri sendiri pada kliennya. Dalam kaitan dengan ini para penyuluh berusaha mengembangkan kemampuan kliennya menjadikan dirinya untuk melayani dirinya sendiri, seperti dapat menilai dan memilih inovasi-inovasi yang sesuai untuk kebutuhan sendiri (Roger dan Shoemaker dalam Abdillah Hanafi, 1987).

Sistem Perubahan (*Change System*)

Sistem perubahan pada umumnya suatu organisasi penyuluhan yang menghubungkan sumber dan pengguna akhir teknologi. Organisasi ini mengasumsikan tugas diseminasi informasi dan pelayanan jasa lain yang dirancang untuk menyempurnakan perubahan perilaku klien (Alma. S Tan, dalam Valera, *et al*, 1987).. Lebih lanjut mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi fungsi dari sistem perubahan. Pertama: doktrin adalah suatu ungkapan dari organisasi mewakili apa, apa itu bekerja keras untuk pencapaian niat, dan metoda atau pendekatan apa yang dipakai untuk mencapai sasaran hasil ini (Arndt dan Ruttan, 1977). Ke dua; Struktur organisasi: struktur organisasi menetapkan kerangka formal untuk tatacara di mana tugas dilaksanakan (Kast dan Resenzweig, 1977). Struktur yang sehat menjadi sumber daya organisasi mempunyai promosi untuk implementasikan tugas yang diemban. Ke empat; program berisi semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi sejalan dengan fungsi yang ditunjuknya. Organisasi apa yang melaksanakan adalah untuk dan atas nama para kliennya (Axinn dan Thorat, 1972). Ke lima; kesuksesan agen perubahan dalam memproduksi perubahan yang diinginkan klien sangat tergantung sampai

sejauh mana penyuluh melakukan perubahan, karena ia berhadapan secara langsung dengan klien.

Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan di Indonesia masih berdiri sendiri dan belum ada suatu model atau sistem penyuluhan pertanian yang disepakati bersama. Kondisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang telah berjalan saat ini belum merupakan suatu kesatuan sistem secara koordinasi, sinkronisasi program dan integrasi. Hubungan antara sumber teknologi sebagai pemasok pengadaan inovasi (*generating system*) dengan lembaga penyuluhan yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab pada sistem penyampaian (*delivery system*) dan sistem penerimaan (*receiving system*) masih berdiri sendiri dalam merancang pola pengembangan inovasi teknologi yang dibutuhkan masyarakat petani atau sistem sosial.

Badan Pengembangan SDM Pertanian (2003), menguraikan beberapa kondisi menyangkut program dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Indonesia:

- 1). Penyusunan program penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dan penyusunan program di BPP/kecamatan tidak dilakukan menyebabkan pemerintah kabupaten/kota tidak mempunyai program yang jelas untuk memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan di BPP/kecamatan. Penyuluh pertanian di BPP/kecamatan dengan tidak adanya program penyuluhan pertanian tidak dapat mengetahui dengan jelas permasalahan yang dihadapi petani yang berada di wilayah kerja BPP (WKBPP).
- 2). Kegiatan penyuluhan pertanian masih berdiri sendiri, belum diperlakukan sebagai bagian dari suatu sistem pemberdayaan atau bagian dari "*delivery system*". Hal ini menyebabkan terputusnya jaringan kerjasama antara penyuluhan pertanian dengan kegiatan pemberdayaan petani lainnya (penelitian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengolahan hasil dan pemasaran).
- 3). Sering dilaksanakan tidak memenuhi prinsip-prinsip penyuluhan; menyebabkan tidak efektifnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
- 4). Penyelenggaraan penyuluhan pertanian masih dalam nuansa keproyekan belum ke nuansa keberlanjutan (*sustainable*); menyebabkan tidak terjaminnya kontinuitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagai bagian dari pembangunan pertanian.
- 5). Masing-masing Dinas mempunyai kegiatan penyuluhan sendiri walaupun "*beneficiaris*"nya sama sehingga sering membingungkan *beneficiaris* (petani/kelompok).
- 6) Belum mendorong kemitraan dengan swasta dan petani (kontaktni, organisasi profesi, assosiasi petani, LSM/NGO, perusahaan swasta). Keadaan ini menyebabkan keterlibatan dan penumbuhan penyuluh pertanian swasta dan swakarsa, sebagai bagian dari jaringan penyuluhan pertanian, kurang berjalan dengan baik.

Kondisi penyelenggaraan penyuluhan pertanian dengan sistem kerja LAKU yang telah dilakukan oleh penyuluh lapangan di BPP hanya dapat diukur dengan peningkatan produksi komoditi pertanian tertentu yang diprogramkan. Menurut Nagel (1997), penyuluhan berdasarkan komoditas bahwa penyuluh hanya bekerja dengan teknologi yang telah diuji dengan baik; suatu yang nampak terungkap dimana keuntungan petani sebagian besar digambarkan dari perspektif organisasi komoditas.

Sistem kerja LAKU dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak lagi relevan pada kondisi dimana petani semakin meningkatnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan serta sikap kritis mereka dalam memilih dan mengadopsi suatu teknologi.

Berdasarkan perkembangan kondisi penyelenggaraan penyuluhan saat ini dan sesuai kebijaksanaan pembangunan pertanian yang berorientasi pada sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistis; menghendaki perlunya perubahan pendekatan atau sistem penyuluhan pertanian di Indonesia dari pendekatan usahatani ke pendekatan sistem dan usaha agribisnis. Untuk mencapai hal tersebut dalam kerangka otonomi daerah maka diperlukan kebijaksanaan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan rekonstruksi dan revitalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian spesifik lokalita.

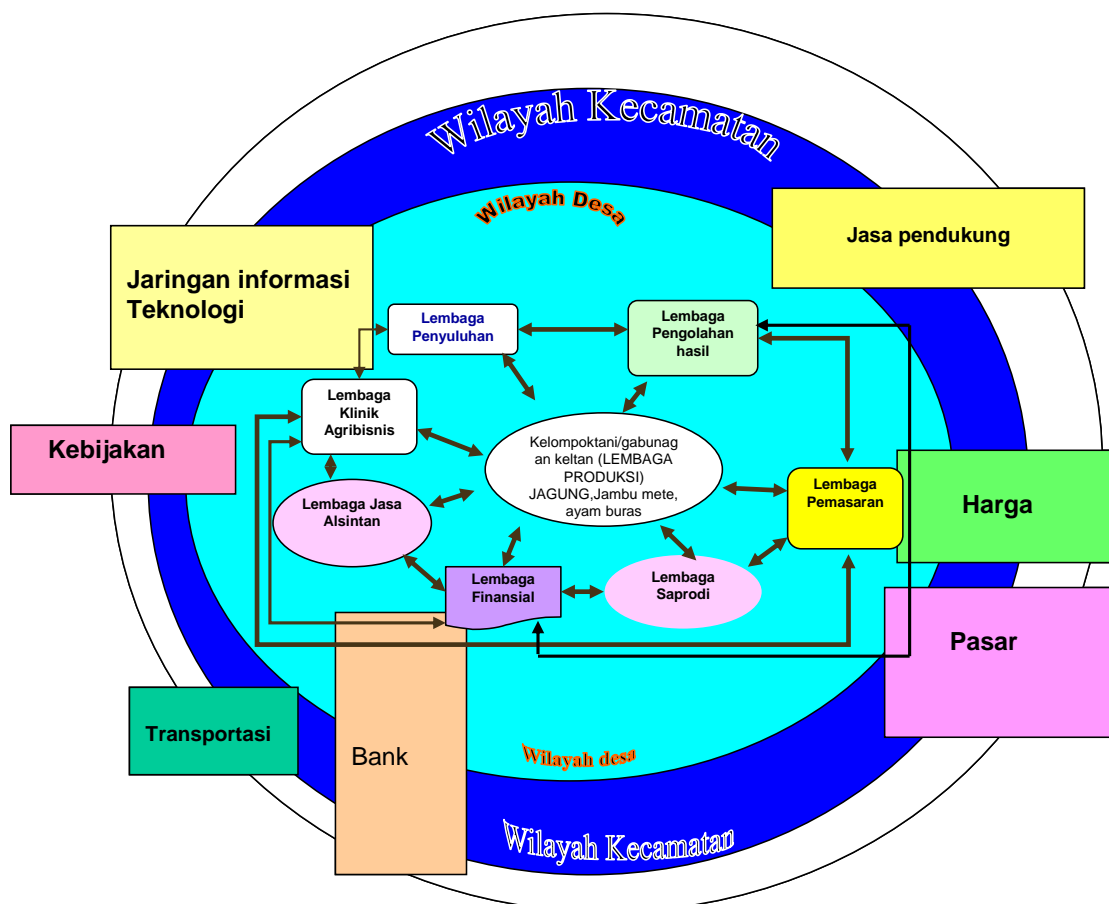
Pada era otonomi daerah dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis maka perlu perubahan sistem atau pendekatan penyuluhan pertanian dengan menggabungkan dari pendekatan penyuluhan partisipatif, pendekatan latihan dan kunjungan, pendekatan pengembangan sistem usahatani, pendekatan biaya patungan dan pendekatan kelembagaan pendidikan (Axinn, 1988; Badan Pengembangan SDM Pertanian, 2003). Pendekatan gabungan tersebut belum menggambarkan sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, sehingga perlu koordinasi, kerjasama dan integrasi dengan lembaga-lembaga atau instansi terkait lainnya. Penggabungan beberapa pendekatan tersebut menurut versi Badan Pengembangan SDM Pertanian tidak ditunjukkan pada suatu model sistem penyuluhan pertanian yang baku sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Menurut Nagel dalam FAO (1997) penyuluhan dapat mengganti suatu aktivitas pada periode tertentu seperti pendidikan kejuruan yang waktu itu belum pada tempatnya, tetapi lebih penting akan menjadi pengajaran ketrampilan organisatoris dan manajemen yang memungkinkan petani untuk terus meningkat kemampuan memecahkan permasalahan mereka sendiri. Nagel menegaskan bahwa pengembangan Sumber daya manusia lebih diarahkan mengenai apa yang mungkin disebut "kemampuan/ wewenang kritis". Klien penyuluhan mengetahui apa yang harus diminta, mereka dapat mengevaluasi kelayakan informasi teknis, bertanggung jawab dalam pembuat keputusan. Seseorang dengan kecakapan seperti itu ada di tiap-tiap komunitas masyarakat pedesaan, dan mereka akan

menjadi lebih aktif mencari bantuan lebih lanjut. Satu tugas penting tentang sistem penyuluhan adalah untuk memperluas pengembangan sumber daya manusia dan kelompok yang serba kekurangan agar dapat mengakses yang lebih formal atau pendidikan kejuruan – petani, wanita tania, pemuda tani, dan petani kecil di wilayah terpencil.

Pendekatan baru tersebut menuntut para penyuluh untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan kompetensi mereka agar mampu memahami kondisi petani (potensi dan permasalahan) dan memperluas sasaran penyuluhan tidak hanya bagi lembaga produksi (kelompok tani) namun semua lembaga yang bergerak dalam kegiatan agribisnis di pedesaan sebagai satu kesatuan dalam melakukan pemberdayaan.

Penyuluh lapangan dituntut untuk melakukan penumbuhan ekonomi lokal melalui pendekatan kelembagaan, pendekatan wilayah (minimal wilayah desa) dan pendekatan komoditas unggulan dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis. Faktor utama yang dibangun berkaitan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis adalah melakukan penumbuhan, pengembangan dan penguatan kelembagaan pedesaan serta membangun jaringan kerjasama antara elemen-elemen kelembagaan agribisnis industrial pedesaan (AIP), seperti pada Gambar 3 berikut ini.

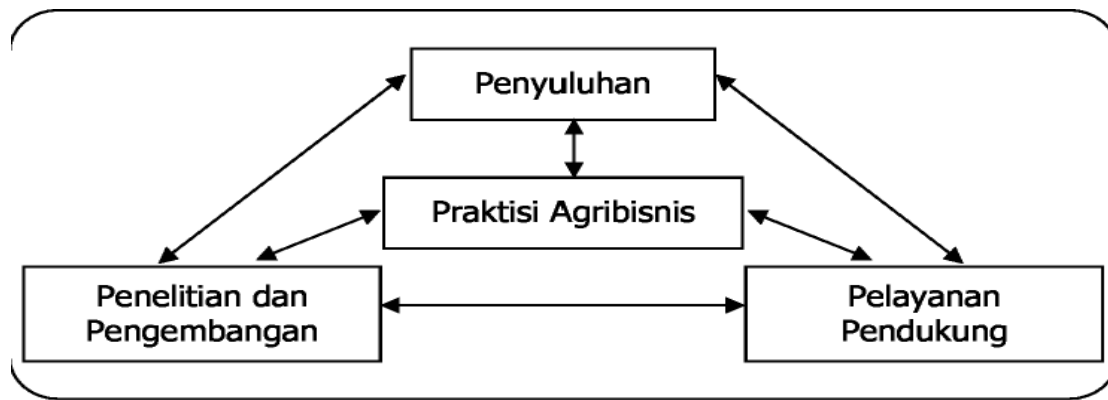


Gambar 3. Contoh model pemberdayaan kelembagaan AIP di desa So Nggajah Kabupaten Dompu NTB (BPTP NTB, 2006).

Penumbuhandan pengembangan model pemberdayaan kelembagaan AIP tersebut menggunakan berbagai pendekatan dan metode penyuluhan penyuluhan yang ada sesuai dengan karakteristik usahatani dan masyarakat petani. Penumbuhan model tersebut dalam transfer inovasi teknologi menggunakan beberapa pendekatan yaitu, Agro-ekosistem, wilayah, kelembagaan, agribisnis, dan kesejahteraan. Model tersebut merupakan model operasional yang sedang berjalan pada program Prima Tani. Berbicara tentang model tidak lagi sebuah konsep melainkan yang operasional yang dirancang melalui pendekatan partisipatif. Model tersebut seharusnya dapat menjadi pegangan pengambil kebijakan dan penyuluh pertanian lapangan, akan tetapi tidak dapat dioperasikan jika pengetahuan penyuluh relatif rendah dan tidak mempunyai kemampuan untuk membangun suatu sistem yang kompleks.

Hubungan peneliti-penyuluh- petani, terutama di Negara-negara berkembang, telah didasarkan pada suatu model agak sederhana. Dalam rangka mencapai pengembangan, "modem" hasil penelitian telah ditransfer ke petani tradisional, dan penyuluhan nampak sebagai alat yang sesuai untuk melakukannya. Penelitian sistem usahatani dan " penemuan kembali" tentang pengetahuan petani (Chambers, Pacey,& Thrupp, 1989) menunjukkan bahwa "teknologi yang ditingkatkan adalah suatu paket masukan dan praktek bahwa pada umumnya datang dari sumber banyak orang". Tinjauan kembali pandangan yang konvensional pada pengetahuan pertanian, bagaimanapun mengakibatkan pertanyaan peranan penelitian yang penting itu sebagai sumber teknologi baru.

Badan Litbang Pertanian telah membangun model percontohan sistem dan usaha agribisnis progresif berbasis teknologi inovatif yang memadukan sistem inovasi dan sistem agribisnis pada Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) di 14 kabupaten tahun 2005 dan akan diperluas menjadi 200 kabupaten di seluruh Indonesia pada tahun 2007. Program ini merupakan langkah terobosan Badan Litbang Pertanian untuk mempercepat penyampaian dan pengembangan inovasi teknologi kepada pengguna, terutama masyarakat tani di pedesaan. Dalam model ini, Badan Litbang Pertanian atau sumber teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai produsen teknologi sumber/dasar, tetapi juga terlibat aktif dalam memfasilitasi penggandaan, penyaluran dan penerapan teknologi inovatif yang dihasilkannya. Program Prima Tani merupakan model terpadu Penelitian – Penyuluhan – Agribisnis – Pelayanan Pendukung (*Research – Extension – Agribusiness – Supporting Service Linkages*).



Gambar 4. Keterkaitan Penelitian–Penyuluh–Agribisnis–Pelayanan (Research– Extension–Agribusiness–Service Linkages) (Badan Litbang Pertanian, 2001)

Model tersebut di atas merupakan salah satu model sistem perubahan dalam sistem penyuluhan untuk mempercepat pemasyarakatan inovasi. Model sistem perubahan menurut versi Badan Litbang Pertanian adalah sebagai berikut:

Pertama, penerapan model pada program Prima Tani akan merajut ulang hubungan sinergis Penelitian – Penyuluhan (*Research – Extension linkage*) yang cenderung semakin melemah atau bahkan terputus di beberapa wilayah sebagai akibat dari belum mantapnya pelaksanaan otonomi daerah. Kegiatan penelitian yang dilakukan ialah mengintegrasikan dengan lembaga kegiatan penyuluhan pertanian di daerah melalui penelitian, pengembangan, pengkajian partisipatif dan desiminasi di dalam "laboratorium lapang", membekali penyuluh dengan pengetahuan dan bahan penyuluhan mengenai teknologi inovatif yang diintroduksikan, serta menyediakan teknologi sumber/dasar hasil temuan atau ciptaannya. Pengembangan model tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari inisiatif untuk revitalisasi penyuluhan yang kini terkesan mengalami kejenuhan yang tentu saja dalam pelayanan kepada klien menggunakan berbagai metode yang sesuai.

Kedua, menjalin hubungan sinergis sumber teknologi dengan petani dan praktisi agribisnis secara umum (*Research -Agribusiness Linkage*), baik secara tidak langsung melalui perantara penyuluh lapang dan lembaga pelayanan, maupun secara langsung melalui kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan program. Praktisi agribisnis yang dimaksud mencakup usahatani rumah tangga skala kecil maupun perusahaan berskala besar. Bidang usaha meliputi usaha pertanian (*on-farm*), produksi dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengolahan dan pemasaran serta penanganan pasca panen. Dengan begitu, teknologi inovatif yang dihasilkan melalui penelitian akan lebih terjamin tepat guna bagi praktisi agribisnis, penyuluh maupun lembaga pemerintah pelayan agribisnis.

Ketiga, model tersebut akan merajut hubungan sinergis sumber teknologi (sistem penelitian) dengan lembaga-lembaga Pelayan Pendukung Agribisnis, utamanya lembaga pemerintah, tidak saja melalui penyediaan informasi dan penyediaan paket rekomendasi teknologi yang sudah berjalan selama ini, tetapi juga dalam upaya percepatan penerapan dan difusi teknologi inovatif. Penerapan model “*laboratorium lapang*” merupakan wahana untuk mengadvokasikan difusi adopsi teknologi melalui program pembangunan pemerintah. Dengan demikian, program akselerasi pemasyarakatan inovasi: (1) mengandung dua unsur pembaruan: Inovasi teknologi tepat guna siap terap dan manajemen usaha agribisnis.; dan (2) inovasi kelembagaan yang memadukan sistem atau rantai pasok inovasi (*innovation system*) dan sistem agribisnis (*agribusiness system*).

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang diprioritaskan pada pengembangan sistem dan usaha agribisnis maka secara filosofi sistem penyuluhan pertanian dapat menggunakan pendekatan: (1) agro-ekosistem; (2) wilayah; (3) agribisnis; (4) kelembagaan; dan (5) kesejahteraan. Pendekatan sistem penyuluhan tersebut lebih diarahkan pada penumbuhan ekonomi wilayah sehingga dapat menjangkau semua klien dalam sistem sosial. Pendekatan-pendekatan tersebut tentunya menggunakan berbagai metode penyuluhan yang ada sesuai kondisi klien dan sistem sosial. Namun demikian pendekatan-pendekatan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan dukungan kebijakan pembangunan pertanian daerah serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi penyuluh pertanian selaku pelaksana di lapangan.

Jika pemerintah mempunyai niat baik dan keberpihakan kepada petani kecil dengan dukungan dana operasional penyelenggaraan penyuluhan dan biaya operasional penyuluh pertanian, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai maka setiap penyuluh pertanian lapangan (PPL) maupun PPS dapat menangani setiap wilayah desa dengan menggunakan pendekatan tersebut di atas dan secara intensif melakukan perubahan-perubahan perilaku petani untuk penumbuhan ekonomi lokal berdasarkan konsep wilayah.

KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan mengenai sistem penyuluhan disimpulkan bahwa:

1. Tujuan penyuluhan adalah memimpin tindakan individu, kelompok dan organisasi dengan melakukan perubahan-perubahan terutama yang terkait dengan adopsi inovasi teknologi sesuai kondisi bio-fisik, kemampuan pengetahuan dan pengalaman, kemampuan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat petani setempat.
2. Sistem penyuluhan merupakan suatu sistem penyampaian inovasi dari sumber teknologi kepada pengguna (petani) dengan menggunakan berbagai pendekatan dan metode yang ada yang sesuai dengan kondisi klien dan sistem sosial, agar inovasi dapat

dimanfaatkan oleh pengguna untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

3. Komponen utama sistem penyuluhan terdiri dari tiga sub sistem yaitu sub sistem klien, sub sistem perubahan dan sub sistem penelitian. Sub sistem penelitian tidak berperan secara langsung dalam penyempamaan inovasi teknologi akan tetapi sebagai pemasok teknologi (*generating system*).
4. Pendekatan penyuluhan ke depan tidak lagi dirancang sebagai sebuah konsep parsial melainkan menyangkut semua aspek dalam kegiatan agribisnis pedesaan, namun harus mampu diwujudkan dalam kegiatan operasional yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi dan terkoordinasi dari semua pelaku pembangunan.
5. Sistem penyuluhan pertanian dapat menggunakan pendekatan: (1) agro-ekosistem; (2) wilayah; (3) agribisnis; (4) kelembagaan; dan (5) kesejahteraan. Pendekatan sistem penyuluhan tersebut lebih diarahkan pada penumbuhan ekonomi wilayah (ekonomi lokal) sehingga dapat menjangkau semua aktivitas kehidupan klien dalam sistem sosial.

Daftar Pustaka

- Axinn, G. H., 1985. System of Agricultural Extension dalam "Education for Agriculture". International Rice Research Institute. Manila. Philippines.
- Axinn, G. H., 1988. Guide On Alternative Extension Approaches. Under the guidance and sponsorship of "Agricultural Education and Extension Service (ESHE) Human Resources Institutions and Agrarian Reform Devison. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.
- Badan Litbang Pertanian, 2001. Rancangan Dasar Prima Tani (Program Rintisan dan Akselerasi Pemasaryakatan Inovasi Teknologi Pertanian). Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Badan Pengembangan SDM Pertanian, 2003. Program Nasional Pengembangan Penyuluhan Pertanian. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- BPTP NTB. 2006. Laporan Penelitian Program Rintisan dan Akselerasi Pemasaryakatan Inovasi Teknologi Pertanian (PRIMA TANI) pada Agroekosistem Lahan Kering Dataran Rendah Iklim Kering di NTB, BPTP NTB. Badan Litbang Pertanian. Mataram. (Tidak dipublikasikan).
- Basuki Irianto, Kukuh Wahyu dan Andri Nurwati. 2001. Evaluasi Adopsi dan Dampak Penelitian dan Pengkajian IPPTP. Laporan Penelitian, Instalasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian. Mataram. (Tidak dipublikasikan).
- Campbell, Dunstan A. and St. Clair Barker. 1997. Selecting appropriate content and methods in programme delivery. dalam "Improving Agricultural Extension. A Reference Manual". Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.
- FAO. 2001. Extension, Education and Communication Servis; Agricultural and Rural Extension Worldwide: Opsionts for Institusional Reform in the Developing Coountries.

- Garna, Judistira K., 1996. Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Proposisi. Program Pascasarjana. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Hanafi Abdillah, 1987. Memasyarakatkan Ide-Ide baru; Disarikan dari Karya Everet Roger dan F. Floyd Shoemaker "Communication of Innovations". Penerbit Usaha Nasional. Surabaya.
- Nagel, Uwe Jens 1997. Alternative approaches to organizing extension dalam "Improving Agricultural Extension. A Reference Manual". Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.
- Puspadi, Ketut, 2002. Rekonstruksi Sistem Penyuluhan Pertanian (Disertasi) Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian. Bogor.
- Rogers, Everett M., 1983. Diffusion of Innovation. (Third Editions). The Free Press, A Division of Macmillan Publishing C. Inc. New York.
- Valera, Jaime. B., Vicente A., Martinez, dan Raino F. Plopino, 1987. An Introduction Extension Delivery Systems. Island Publishing House, Inc., Manila. Philippines.